



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017

Pengantar

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat

Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKKPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2004.

Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 27 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (*self-assessment*) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing Pemda sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LPPD ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2017 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2018
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi	8
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro	12
2.2 Kebijakan Keuangan	12
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	13
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	26
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	28
BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN (APBN)	
4.1. Tujuan dan Sasaran	31
4.2. Tugas dan Fungsi.....	33
4.3. Capaian Kinerja Organisasi.....	
BAB V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU dan Penataan Ruang dibentuk pada berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PU dan Penataan Ruang sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan

gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan program kerja perangkat daerah pada Dinas PU dan Penataan Ruang yang dilaksanakan selama tahun 2017 sebanyak 17 program dan 88 kegiatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

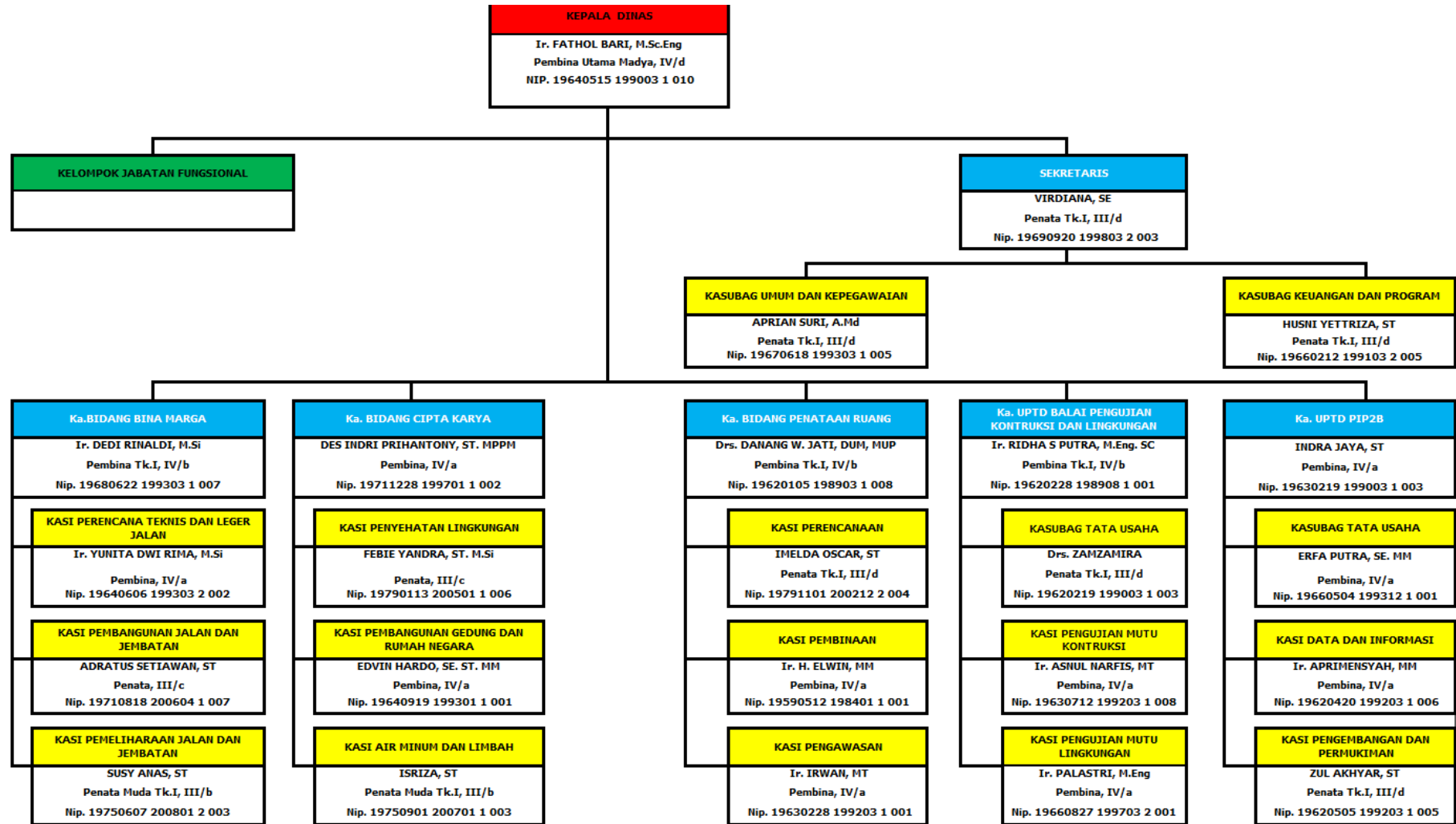
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
 - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan
 - 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
 - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
5. Bidang Penataan Ruang
 - 5.1. Seksi Perencanaan
 - 5.2. Seksi Pembinaan
 - 5.3. Seksi Pengawasan
6. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan
 - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
 - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Lingkungan
7. UPTD PIP2B
 - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.2. Seksi Data dan Informasi
 - 7.3. Seksi Pengembangan dan Permukiman
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian konstruksi dan lingkungan dan PIP2PB. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. dilengkapi juga dengan beberapa kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Secara

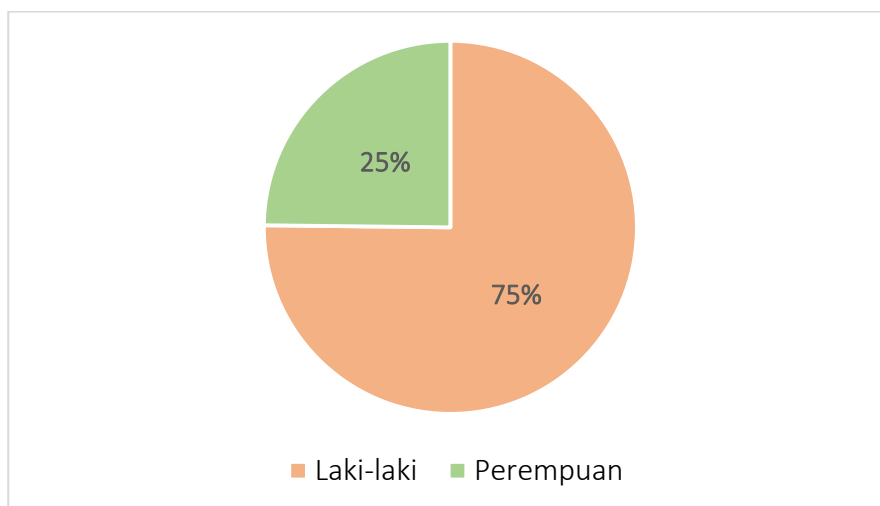
lengkap bagan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat berikut ini.

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Barat**



1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 404 (Empat Ratus Empat) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.



Gambar 1. 1
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, berdasarkan Jenis Kelamin.

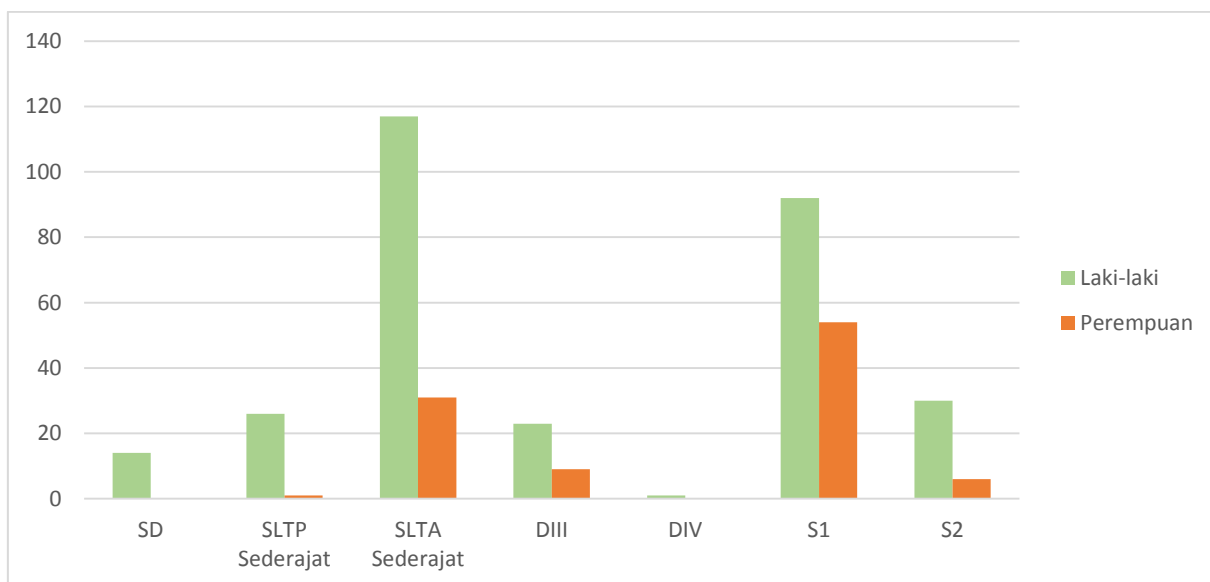
Tabel 1. 1
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	303 orang	75%
Perempuan	101 orang	25%

Tabel 1. 2
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	14	0	14
SLTP Sederajat	26	1	22

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SLTA Sederajat	117	31	148
DIII	23	9	32
DIV	1	0	1
S1	92	54	146
S2	30	6	36
Jumlah	303	101	404

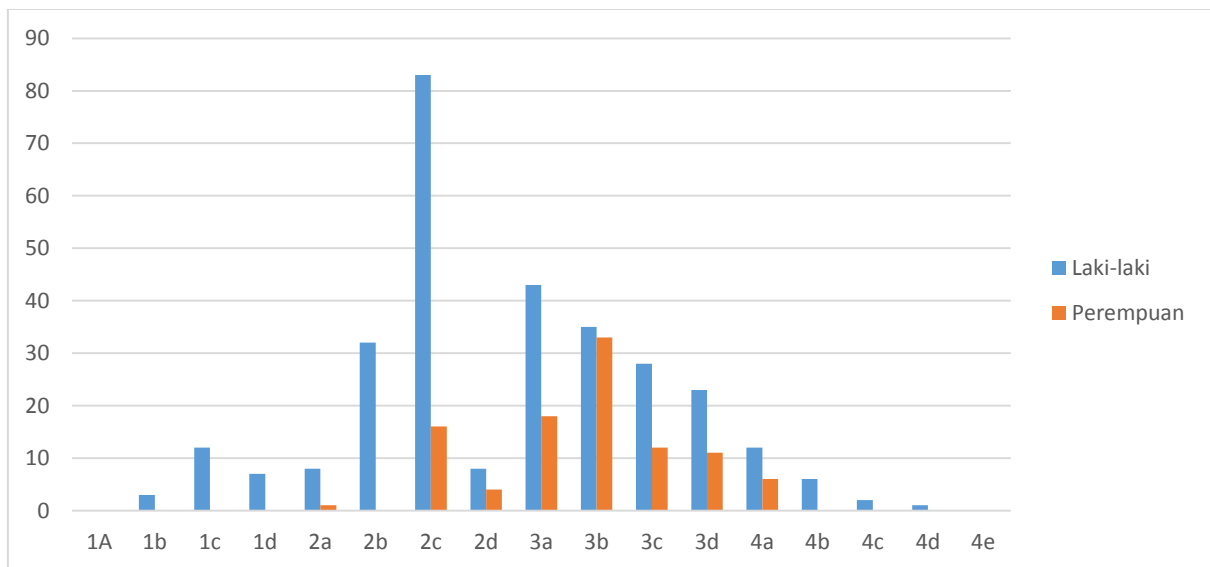


Gambar 1. 2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	0	0	0
1b	3	0	3
1c	12	0	12
1d	7	0	8
2a	8	1	9

2b	32	0	32
2c	83	16	99
2d	8	4	12
3a	43	18	61
3b	35	33	68
3c	28	12	40
3d	23	11	37
4a	12	6	18
4b	6	0	6
4c	2	0	2
4d	1	0	1
4e	0	0	0



Gambar 1. 3
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2017

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau

bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serata secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai dengan target nasional dan sebagaimana juga tertera *universal access* terkait prasarana air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah dalam penyediaan pembangunan gedung negara dalam rangka rekonstruksi bangunan pasca gempa 2009. Selain itu, Dinas PUPR juga berperan dalam pembangunan Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis lingkungan hidup yaitu Danau Maninjau. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan revisi RTRW serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR tidak hanya

menghasilkan infrastruktur fisik semata, namun juga mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. Isu Strategis

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat.

Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih tingginya panjang jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 71,05% dengan deviasi yang cukup jauh dari kemantapan jalan nasional (91,48%) sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan agar mencapai setidaknya 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu (1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset; (3) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama pemanfaatan ruang; (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang; (3) terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerjadalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjaditantang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangkamenghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukumyang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikas, pelatihan tenagakerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi

pengalaman professional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

Selain faktor eksternal tersebut, permasalahan juga harus dihadapi dari sisi internal organisasi. Sesuai dengan Pergub No. 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penggabungan tupoksi keuangan dan program dibawah Subag Keuangan dan Program dirasa terlalu berat dalam mengawasi kedua tupoksi tersebut secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B memiliki sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2017 Indikator pencapaian ekonomi makro pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pelaksanaan tugas di bidang keciptakaryaan, kebinamargaan serta bidang penataan ruang
6. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang keciptakaryaan, bidang kebinamargaan serta bidang penataan ruang.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2017 meliputi hal berikut :

2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan untuk tahun 2017 diarahkan pada peningkatan penerimaan retribusi daerah yang terdiri dari peningkatan penerimaan di bidang retribusi jasa sewa alat berat dan penerimaan retribusi workshop dan laboratorium balai uji dan penerimaan retribusi sewa alat berat.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2017, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat menyurat dan kebutuhan materai selama 1 tahun
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi , PDAM, listrik dan internet untuk pendukung operasional kantor selama 1 tahun
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Tersedianya tenaga untuk kebersihan, pengamanan serta sopir kantor selama 1 tahun
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan perlengkapan pakai habis selama 1 tahun
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan/fotocopy yang diperlukan selama 1 tahun
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
7.	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 majalah sirkulasi, 2 koran nasional, 5 koran lokal dan 6 tabloid lokal
8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas di dalam dan e luar daerah untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun
9.	Penyediaan Jasa Informasi,	Terlaksananya kegiatan informasi,

	Dokumentasi dan Publikasi	dokumentasi dan publikasi yaitu 25 pariwisata dan 2 dialog interaktif
--	---------------------------	---

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Spanduk/Baliho Untuk Peringatan Hari Hari Besar Nasional
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yaitu 1 instalasi jaringan listrik TM, 1 jaringan instalasi AC dan 2 bangunan gedung kantor
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional serta asuransikendaraan dinas berupa Jasa Service 20 untuk unit Kendaraan Roda 4, Suku Cadang 15 unit Kendaraan Roda 4, Suku Cadang 1 unit Roda 6 dan 25 Premi Asuransi Kendaraan serta Pajak Kendaraan Bermotor 25 unit
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mesin fax, 3 Genset, 1 Mesin Pompa Air, Retribusi Apar, 15 Tabung Pemadam, 11 unit PC, 6 Notebook, dan 6 Printer

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS dan PTT Dinas PUPR sebanyak 420 Stel

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman Peraturan 47 orang Pegawai/Undangan Pelatihan Diklat Perundang-undangan

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja SKPD 3 Laporan (LAKIP, LKPJ dan LPPD)
2.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan SKPD selama 1 Tahun

VI. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan dan Asset

Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan dan Asset ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar sebanyak 3 Dokumen
2.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan 12 Laporan Pelaporan Program

		tahunan SKPD secara Terpadu
3.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota selama 1 tahun

VII. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan ini didukung oleh 19 (sembilan belas) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	Terlaksananya Dokumen Pekerjaan Mendesak 5 Dokumen Bencana Alam (1 Dokumen), IRMS Jalan (1Dokumen), BMS Jembatan (1 Dokumen), DED Jalan Provinsi (3 Dokumen), DED Jembatan Provinsi (4 Dokumen)
2.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi/ Strategis Provinsi serta Prasarana ke PU-an sebanyak 4 Dokumen
3.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab.Pesisir Selatan	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kota Padang dan Kab.Pesisir Selatan sepanjang 2,32 Km yaitu Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073), Jalan Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)
4.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Pariaman dan Kab.Padang Pariaman	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Pd.Pariaman dan Kota Pariaman sepanjang 1,0 Km yaitu Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)
5.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Solok dan Kota Solok sepanjang 2,5 Km yaitu Jalan Sp. Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani (P.092), Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)
6.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.50 kota dan Kota Payakumbuh sepanjang 947,50 m yaitu Jalan Simpang

		Padang Karambia-Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)
7.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat sepanjang 2,925 Km yaitu Jalan Lubuk Sikaping-Talu (P.096), Jalan Padang Sawah-Kumpulan (P.068), Jalan Tapus-Mauaro Sei. Lolo-Gelugur (P.102)
8.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya sepanjang 1,75 Km yaitu Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3), Jalan Simpang Koto Baru – Junction (P.012)
9.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab.Tanah Datar	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kota Sawahlunto dan Kab.Tanah Datar sepanjang 1,45 Km yaitu Jalan Rawang-talawi (P.102)
10.	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - I	Terbangunnya jembatan wilayah – I sepanjang 60 m yaitu Jembatan Lolong (P.100), Jembatan Bayang Nyalo (P.073)
11.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi sepanjang 1,78 Km yaitu Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)
12.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Solok Selatan	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Solok Selatan sepanjang 1,50 Km yaitu jalan Simpang Padang Aro – Lubuk Malako (P.056.1)
13.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Kepulauan Mentawai	Terbangunnya Jalan Provinsi dan di Wilayah Kab. Kep. Mentawai sepanjang 1 Km yaitu Jalan Simp. SP II - Kantor Camat (P.103)
14.	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 5 Paket Terhadap 22 Paket Pemb./Peningkatan Jl & Jbt dan 2 Paket Rehab/Pemeliharaan Jalan & Jembatan
15.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan dan Koordinasi Pembangunan Jalan/Jembatan Sumatera Barat
16.	Pengadaan Lahan Untuk	Terlaksananya Pembebasan Lahan seluas

	Pembangunan Jalan dan Jembatan	5.600 M ² untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Ruas Manggopoh - Padang Lua (P.025). Jembatan Barulak dan Jembatan Batang Ketek (P.079).
17.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis	Terlaksananya Pembebasan Lahan seluas 3.600 M ² Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis di Jalan dan Jembatan Kuranji dan Convention Hall Serta Persiapan Pengurusan Lahan Jalan Tol Padang - Pekanbaru
18.	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - II	Terbangunnya jembatan provinsi wilayah – III sepanjang 43 m yaitu Jembatan Barulak dan Jembatan Batang ketek (P.079), Paket Pembangunan Jembatan Malampah, Jembatan Batang Simaran, Jembatan Lubuk Bonta dan Jembatan Penyeberangan 2 (P.068) (Penyelesaian Sisa Kontrak 2016) (FHO)
19.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi DAK	Terbangunnya jalan provinsi DAK sepanjang 6,25 Km yaitu Jalan Teluk Bayur – Nipah – purus DAK (P.098). Jalan Bts Kota Payakumbuh – Sitangkai DAK, Jalan Lubuk Sikaping - Talu

VIII Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan ini didukung oleh 15 (lima belas) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat sepanjang 151,68 Km dan 3 paket pekerjaan yaitu Paket Pembuatan Saluran Drainase/Trotoar Ruas Jalan Panti - Simpang Empat, Paket Pembuatan Saluran Drainase Ruas Jalan Rao - Rokan Hulu, Paket Pengawasan Pembuatan Saluran Drainase/Trotoar Wilayah Pasaman

2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Bukittinggi dan Agam Timur	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi sepanjang 129,67 Km
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh sepanjang 122,03 Km
4.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang sepanjang 117,60 Km
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman dan Kota Padang	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang sepanjang 70,84 Km dan 1 paket pekerjaan Rehabilitasi Drainase Diperkeras/Rigid Bahu Jalan Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji
6.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok dan Kota Solok	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Solok, Kota Solok sepanjang 104,21 Km
7.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok Selatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Solok Selatan sepanjang 116,38 Km
8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kota Sawahlunto, Kab.Sijunjung, Kab.Dharmasraya 131,78 Km dan 1 paket pekerjaan Pembuatan Beton Penutup Drainase Pasar Koto Baru
9.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Pesisir Selatan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Pesisir Selatan sepanjang 46,84 Km
10.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dan 3 paket pekerjaan yaitu Paket rehabilitasi berat jembatan provinsi, Paket Pengawasan Rehabilitasi Berat Jembatan provinsi dan Paket Penggantian Lantai Jembatan Cibodak Ruas Jalan Singkarak – Arian –

		Tj.Balit – Pdg Ganting
11.	Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan dan penganggaran tanggap darurat bencana alam jalan dan jembatan di 9 wilayah Provinsi Sumatera Barat
12.	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	Terkontrol dan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan sebanyak 17 unit
13.	Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan	Terlaksananya penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi kritis akibat bencana alam di 4 wilayah
14.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Agam	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang terletak di Kab. Agam sepanjang 129,50 Km dan 1 paket pekerjaan Lanjutan Rigid Badan Jalan Ruas Jalan Palupuh - Puagadih
15.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 Paket yaitu Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I dan Paket Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	Tersedianya peralatan dan alat ukur sebanyak 4 paket yaitu Paket Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan, Paket Pengadaan Alat Laboratorium Konstruksi, Paket Pengadaan Alat Geoteknik, Paket Pengadaan Alat Pengujian Tanah dan Beton
2.	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	Terkendalnya mutu bahan untuk pekerjaan ke PU-an
3.	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Ke PU An	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat ukur dan laboratorium

X. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan sistem pengelolaan air minum dan air limbah ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyusunan DED SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Pelayanan Air Minum Regional sebanyak 1 dokumen yaitu Pra Perencanaan SPAM Regional Agam - Bukittinggi
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya instalasi jaringan air minum pada 1 kawasan yaitu Kws.Ujung Gading Kab.Pasaman Barat
3.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya dan di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Laporan Pengendalian Kegiatan keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 12 laporan bulanan
4.	Updating Database Kegiatan Bidang Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penyusunan Database Kegiatan Bidang Keciptakarya berupa 1 Dokumen

XI. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana I	Terlaksananya Bangunan Gedung Negara sebanyak 4 gedung yaitu Gedung ESDM (tahap akhir),Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB, Gedung DPKD (tahap akhir),Gedung Badan Ketahanan Pangan (tahap akhir)
2.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II	Terlaksananya Bangunan Gedung Negara sebanyak 2 Gedung dan 1 Pematangan Lahan yaitu Gedung UPTD Balai Koperasi,

		Gedung Dinas Kelautan dan Pematangan Lahan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat
3.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana III	Terlaksananya bangunan gedung sebanyak 2 gedung dan 2 pengadaan yaitu Gedung Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat dan Pengadaan Interior dan Mebeulair Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4.	Lanjutan Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi	Tersedianya gedung Pengendali Inflasi sebanyak 1 unit
5.	Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat	Tersedianya stadium utama sumatera barat sebanyak 1 unit
6.	Lanjutan Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat	Tersedianya gedung Convention Hall Sumatera Barat sebanyak 1 unit
7.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	Tersedianya gedung Kebudayaan Sumatera Barat sebanyak 1 unit
8.	Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD	Terbangunnya rumah dinas TNI AD (Kodim 0304) sebanyak 1 unit
9.	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan teknis (TPT) bangunan negara
10.	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Linggar Jati	Terlaksananya pembangunan shelter evakuasi tsunami wilayah I sebanyak 2 paket yaitu Shelter Di Mushalla Jabal Rahmah di Painan (Lanjutan) Shelter Evakuasi Tsunami SMA 1 Sutra Kab.Pessel
11.	Perencanaan Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung sebanyak 13 dokumen yaitu DED Guest House Gubernur,DED Bangunan Parkir Dinas Prastarkim,DED Bangunan Parkir Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat,DED Gedung Pengendalian Inflasi Bukittinggi,Disain Interior Rumah Wakil Gubernur,Desain Interior Gedung Convention Hall,DED Rehabilitasi Sporthall,DED Rehabilitasi gedung-gedung KONI Sumbar,DED Rehabilitasi Stadion GOR H. Agus Salim, DED Renovasi Rumah Dinas

		Kadis PUPR Sumbar,DED Pagar Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang, Penyusunan Masterplan Pemanfaatan Kawasan Jalur Lama Kelok 9 Kab.50 Kota, dan Penyusunan Studi Kelayakan Pemanfaatan Kawasan Jalur Lama Kelok 9 Kab.50 Kota
12.	Pengawasan Bangunan Gedung	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung di berbagai Paket pembangunan Gedung
13	Pembangunan Prasasti APDN Lama	Tersedianya Prasasti APDN Lama sebanyak 1 unit

XII. Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi ini didukung oleh 4 (lima) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	Terlaksananya buku laporan monitoring pengawasan dan perizinan pemasangan utilitas umum
2.	Profil Jasa Konstruksi	Tersedianya 1 dokumen profil jasa konstruksi
3.	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendalaman Perpres 54/2010 dan Perubahan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terlaksananya Forum Komunikasi Jasa Konstruksi 2 kali dan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi
4.	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Dasar/Workshop E-Procurement, Aspek Hukum Kontrak, Pelatihan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Bimtek Sistem Manajemen Mutu, Kegiatan Bimtek Pengelola Teknis Bangunan Gedung

XIII Program Pengembangan Kinerja Penyelenggaraan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan

Program Program Pengembangan Kinerja Penyelenggaraan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Kegiatan Penilaian Laik Fungsi Bangunan Gedung (TABG)	Terlaksananya Pembinaan Fasilitas TABG sebanyak 1 Kali untuk 50 orang
2.	Assemen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Assesmen Bangunan Gedung

XIV Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat
2.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terlaksananya Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation di Kabupaten/Kota
3.	Penyusunan Zonasi Sistem Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Zonasi Kawasan Danau Maninjau
4.	Proses Legalisasi Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Terlaksananya Proses Legalisasi Rencana KSP Kawasan Danau Singkarak
5.	Kampanye Publik Penataan Ruang	Terlaksananya Kampanye Publik Penataan Ruang Melalui Media Massa

XV. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
----	----------	----------------

1.	Monitoring Pelaksanaan Perda RTRW dan Pengendalian Teknis SPM Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Monitoring Perda RTRW dan Pengendalian Teknis SPM Bidang Penataan Ruang
----	--	---

XVI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi UPTD

XVI Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi

I.

Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pembangunan Drainase Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Drainase Lintas Kabupaten/Kota sepanjang 5 Km

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2017, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp.437.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja daerah untuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 559.981.586.909,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 34.679.823.067,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 37.941.580.816,00
- Belanja Modal Rp. 289.337.169.421,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

2. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.496.749.360,00

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2017 jika dibanding dengan anggaran tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2017

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	437.000.000	1.496.749.360	342,51	1.059.749.360
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	437.000.000	1.496.749.360	342,51	1.059.749.360

Pada tabel di atas terlihat realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan permukiman sebesar 342,51 %. Yang berasal dari pendapatan

retribusi daerah. Jika ditinjau dari realisasi pendapatan yang ditargetkan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berhasil mencapai target pendapatan retribusi daerah yang telah ditetapkan. Adapun sumber pendapatan retribusi tersebut terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.1.496.749.360 berupa retribusi laboratorium senilai Rp. 445.836.360 dan retribusi alat berat senilai Rp.1.050.913.000

3. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	BELANJA	361.958.573.304	335.323.949.259	92,64	26.634.624.045
I	BELANJA OPERASI	72.621.403.883	70.851.477.852	97,56	1.769.926.031
1	Belanja Pegawai	34.679.823.067	34.403.521.642	99,20	276.301.425
2	Belanja Barang	37.941.580.816	36.447.956.210	96,06	1.493.624.606
II	BELANJA MODAL	289.337.169.421	264.472.741.407	91,41	24.864.698.014
1	Belanja Tanah	5.448.238.271	271.462.061	4,98	5.176.776.210
2	Belanja Peralatan dan Mesin	859.182.000	845.166.268	98,37	14.015.732
3	Belanja Gedung dan Bangunan	127.473.692.500	119.719.312.840	93,32	7.754.379.660
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.556.056.650	143.636.530.238	92,34	11.919.526.412
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0,00	0.00

Seluruh realisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang terdapat pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran ini terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.540.000	6.051.910	488.090	92,5 4
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1.652.800.000	1.531.007.943	121.792.057	92,6 3
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	1.158.410.286	1.135.309.014	23.101.272	98,0 1
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	157.252.000	139.097.880	18.154.120	88,4 6
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.874.800	83.710.270	21.164.530	79,8 2
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	21.000.000	19.404.050	1.595.950	92,4 0
7.	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	21.000.000	20.910.000	90.000	99,5 7
8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	536.000.000	527.370.589	8.629.411	98,3 9
9.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	64.000.000	63.950.000	50.000	99,9 2

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
---	----------	----------	-----------	------	---

O				ANGGARAN	
1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	6.640.000	360.000	94,86
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.006.065.000	788.586.000	217.479.000	78,38
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	376.200.000	367.665.339	8.534.661	97,73
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.150.000	54.552.460	26.597.540	67,22

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur ini terdiri atas 1(satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	313.729.000	297.440.000	16.289.000	94,81

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	245.652.000	222.963.691	22.688.309	90,76

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyusunan Laporan	74.999.755	69.383.330	5.616.425	92,5

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1
2.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	711.300.000	704.750.000	6.550.000	99,08

VI. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset

Program perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	285.500.000	278.187.376	7.312.624	97,44
2.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	220.000.000	195.995.993	24.004.007	89,09
3.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	280.354.000	240.231.043	40.122.957	85,69

VII. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan ini terdiri atas 19 (sembilan belas) kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	2.016.237.600	1.774.664.200	241.573.400	88,02
2.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	943.892.575	940.202.200	3.690.375	99,61
3.	Pembangunan Jalan dan	7.904.693.100			

	Jembatan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab.Pesisir Selatan		7.899.202.700	5.490.400	99,9 3
4.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Pariaman dan Kab.Padang Pariaman	6.500.000.000	6.409.621.700	90.378.300	98,6 1
5.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok	10.404.167.10 0	10.397.202.375	6.964.725	99,9 3
6.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	5.534.438.600	5.532.022.500	2.416.100	99,9 6
7.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat	12.205.914.60 0	12.197.982.750	7.931.850	99,9 4
8.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	7.632.688.100	7621307850	11.380.250	99,8 5
9.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab.Tanah Datar	5.792.732.000	5.785.254.775	7.477.225	99,8 7
10	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - I	12.388.598.00 0	7.124.787.000	5.263.811.00 0	57,5 1
11	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi	5.739.661.000	5.734.122.300	5.538.700	99,9 0
12	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Solok Selatan	5.939.807.000	5.939.063.000	744.000	99,9 9
13	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Kepulauan	5.570.700.000	5.568.440.000	2.260.000	99,9 6

	Mentawai				
14	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	5.200.000.000	4.992.268.725	207.731.275	96,0 1
15	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	400.000.000	392.009.454	7.990.546	98,0 0
16	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.450.000.000	219.530.665	1.230.469.33 5	15,1 4
17	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis	3.998.238.271	51.931.396	3.946.306.87 5	1,30
18	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - II	16.384.758.35 0	12.038.838.700	4.345.919.65 0	73,4 8
19	Pembangunan Jalan Provinsi DAK	31.929.960.40 0	31.926.631.491	3.328.909	99,9 9

VIII. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan ini terdiri atas 15 (lima belas) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pasaman dan Kab.Pasaman Barat	3.317.664.000	3.315.112.804	2.551.196	99,9 2
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Bukittinggi dan Agam Timur	2.300.000.000	2.299.029.000	971.000	99,9 6
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	2.000.000.000	1.999.444.538	555.462	99,9 7
4.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di	2.000.000.000	1.999.966.465	33.535	100

	Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang				
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman dan Kota Padang	1.100.000.000	1.097.036.800	2.963.200	99,73
6.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok dan Kota Solok	1.800.000.000	1.799.938.350	61.650	100
7.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok Selatan	2.000.000.000	1.999.988.250	11.750	100
8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	2.700.000.000	2.499.863.397	200.136.603	92,59
9.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Pesisir Selatan	700.000.000	699.993.713	6.287	100
10.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan	3.300.000.000	2.338.235.675	961.764.325	70,86
11.	Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan	195.222.200	189.924.701	5.297.499	97,29
12.	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	250.000.000	238.696.750	11.303.250	95,48
13.	Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan	2.700.000.000	2.529.772.335	170.227.665	93,70
14.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Agam	2.400.000.000	2.399.300.100	699.900	99,97
15.	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.839.575.000	6.792.040.450	47.534.550	99,31

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana ke bina margaan ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	882.282.000	865.263.268	17.018.732	98,07
2.	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	282.042.050	262.048.350	19.993.700	92,91
3.	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Ke PU An	148.277.100	145.707.529	2.569.571	98,27

X. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan sistem pengelolaan air minum dan air Limbah ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyusunan DED SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	98.530.000	91.984.450	6.545.550	93,36
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat	4.268.598.000	3.706.382.643	562.215.357	86,83
3.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya dan Kebinamargaan di Provinsi Sumatera Barat	400.000.000	293.586.477	106.413.523	73,40
4.	Updating Database Kegiatan Bidang Keciaptakarya di	150.000.000	137.999.880	12.000.120	92,00

	Provinsi Sumatera Barat				
--	-------------------------	--	--	--	--

XI. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kotaini terdiri atas 13 (tiga belas) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana I	48.096.279.000	47.112.483.400	983.795.600	97,95
2.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II	8.393.329.600	8.002.983.947	390.345.653	95,35
3.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana III	13.188.252.200	11.652.724.533	1.535.527.667	88,36
4.	Lanjutan Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi	2.832.463.500	2.825.522.800	6.940.700	99,75
5.	Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat	15.000.000.000	11.104.134.650	3.895.865.350	74,03
6.	Lanjutan Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat	9.930.752.000	9.859.617.500	71.134.500	99,28
7.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	25.000.000.000	24.389.815.700	610.184.300	97,56
8.	Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD	200.000.000	195.875.500	4.124.500	97,94
9.	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	200.000.000	164.359.700	35.640.300	82,18
10	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Linggar Jati	645.590.000	587.629.250	57.960.750	91,02

11	Perencanaan Bangunan Gedung	878.585.000	733.866.860	144.718.140	83,53
12	Pengawasan Bangunan Gedung	2.608.522.500	2.579.586.900	28.935.600	98,89
13	Pembangunan Prasasti APDN Lama	699.918.700	675.071.800	24.846.900	96,45

XII. Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Konstruksi

Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	142.127.000	130.105.846	12.021.154	91,54
2.	Profil Jasa Konstruksi	96.060.750	89.634.340	6.426.410	93,31
3.	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	184.199.700	163.085.600	21.114.100	88,54
4.	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	380.414.400	364.589.148	15.825.252	95,84

XIII. Program Pengembangan Kinerja Penyelenggaraan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan

Program pengembangan kinerja penyelenggaraan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Kegiatan Penilaian Laik Fungsi Bangunan Gedung (TABG)	282.801.000	192.386.408	90.414.592	68,03
2.	Asesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi	94.490.500	88.841.525	5.648.975	94,0

	Laik Fungsi Bangunan Gedung				2
--	-----------------------------	--	--	--	---

XIV. Program Perencanaan Tata Ruang

Program program perencanaan tata ruang ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	724.113.100	693.996.107	30.116.993	95,84
2.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	473.580.800	453.081.975	20.498.825	95,67
3.	Penyusunan Zonasi Sistem Provinsi	703.916.400	685.820.900	18.095.500	97,43
4.	Proses Legalisasi Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	463.771.300	395.337.259	68.434.041	85,24
5.	Kampanye Publik Penataan Ruang	300.000.000	214.138.800	85.861.200	71,38

XV. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program program pengendalian pemanfaatan ruang ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Monitoring Pelaksanaan Perda RTRW dan Pengendalian Teknis SPM Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	145.746.900	112.709.383	33.057.517	77,33

XVI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017

adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	299.566.000	242.229.862	57.336.138	80,8 6

XVII. Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi

Program program pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pembangunan Drainase Lintas Kabupaten/Kota	221.766.000	211.191.330	10.574.670	95,2 3

4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ditemui adanya permasalahan yang signifikan. Namun ada beberapa kegiatan pada tahun 2017 yang memiliki realisasi pencapaian target dibawah 90 % yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) kegiatan. Adapun penyebab rendahnya pencapaian target masing – masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Penyebab Rendahnya Realisasi
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor (88,46 %)	Sisa anggaran senilai 11,54 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (79,82 %)	Sisa anggaran senilai 20,18 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (78,38 %)	Terdapat 1 (satu) pekerjaan yang tidak terlaksana yaitu Rehab Kantor Kegiatan Rehab/Pemel Wilayah Sijunjung dana Rp. 200.000.000 realisasi Rp. 0 sisa Rp. 200.000.000 disebabkan adanya konflik dengan masyarakat setempat
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (67,22 %)	Sisa anggaran senilai 32,78 % yang tidak terserap berasal dari anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional genset yang hanya digunakan

		sebagai cadangan pada saat listrik mati.
5	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD (89,09 %)	Sisa anggaran senilai 10,01 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran
6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD (85,69 %)	Sisa anggaran senilai 14,31 % merupakan Efisiensi terhadap perjalanan dinas Sensus dan pendataan asset
7	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi (88,02 %)	Sisa anggaran senilai 11,98 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran
8	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - I (57,51 %)	Terdapat 1 (satu) paket pekerjaan yang tidak terealisasi maksimal yaitu paket pembangunan jembatan lolong (P.100) dimana paket pekerjaan ini baru bisa dilaksanakan setelah anggaran perubahan terkait dengan pemberian tanda bintang pada paket pekerjaan ini di DPA awal
9	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan (15,14 %)	Peta bidang terbit pada tanggal 21 Desember 2017 sehingga penilaian harga oleh appraisal tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.
10	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis (1,30 %)	Untuk lokasi Convention Hall kesesuaian tata ruang belum terbit sehingga proses pengadaan lahan tidak dapat dilaksanakan sedangkan pada pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kurangi masih terdapat sengketa lahan dan putusan pengadilan baru terbit pada bulan oktober 2017 sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan
11	Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - II (73,48 %)	Terdapat 1 (satu) paket pekerjaan yang tidak terealisasi 100 % dikarenakan faktor kelalaian kontraktor pelaksana dan faktor cuaca (curah hujan tinggi) berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dana yang tersedia di DPA tidak dapat terserap maksimal. Adapun paket pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan pembangunan Jembatan Barulak dan Jembatan Batang Ketek (P.079)
12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan (70,86 %)	Sisa anggaran senilai 29,14 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran

13	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat Wilayah I (86,83 %)	Sisa anggaran senilai 13,17 % berasal dari : 1). Peningkatan SPAM kawasan Ujung Gading Kab. Pasaman Barat (lanjutan) dana Rp. 3.396.486.400 teralisasi Rp. 3.069.000.000 sisa Rp. 327.486.400 sisa tender. 2). Paket Pembayaran bobot sisa penyelesaian pekerjaan pengembangan SPAM Kws. Singgalang - Kota Padang Panjang Kab. Tanah Datar tahun 2016 dana Rp. 618.598.000 teralisasi Rp. 439.754.943 sisa Rp. 178.843.057 pelaksanaan pekerjaan tidak selesai, didenda maksimal 50 hari tidak selesai kemudian putus kontrak fisik hanya teralisasi 62 %.
14	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat (73,40 %)	Sisa anggaran senilai 26,60 % karena Kegiatan yang ada sebagian besar berada di Ibukota dalam Provinsi, anggaran perjalanan dinas yang semula juga dianggarkan untuk monitoring dan evaluasi Kegiatan APBN tidak terlaksana dengan optimal karena keterbatasan waktu dan SDM.
15	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana III (88,36 %)	Paket Pengadaan Interior dan Mebeulair Rumah Dinas Wakil Gubernur dana Rp. 3.950.000.000 teralisasi Rp. 2.446.619.000 sisa Rp. 1.503.381.000 disebabkan kondisi lapangan, sehingga dilakukan optimalisasi pengadaan Interior dan Meubeleur Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat .
16	Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat (74,03 %)	Terkendala pembebasan lahan yang menyebabkan pekerjaan terhenti selama 1 bulan, sehingga di akhir tahun dana yang tersedia tidak terserap maksimal
17	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat (82,18 %)	Sisa anggaran senilai 28,62 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran karena Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
18	Perencanaan Bangunan Gedung (83,53 %)	Terdapat 1 (satu) paket pekerjaan yang tidak terlaksana yaitu DED Rehabilitasi Stadion GOR H. Agus Salim disebabkan pelaksanaan Kegiatan HPN (Hari Pers

		Nasional)
19	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi (88,54 %)	Sisa anggaran senilai 11,46 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran
20	Kegiatan Penilaian Laik Fungsi Bangunan Gedung (TABG) (68,03 %)	Terdapat 1 (satu) rekening belanja yang tidak terealisasi maksimal yaitu Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dimana pergub Yang mengatur tentang pembayaran honorarium baru terbit di bulan maret sehingga honorarium sebelum bulan maret tidak dapat direalisasikan
21	Proses Legalisasi Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) (85,24 %)	Kegiatan utama yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Kws Strategis Danau Singkarak telah terlaksanakan sisa anggaran senilai 14,76 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran
22	Kampanye Publik Penataan Ruang (71,38 %)	Sisa anggaran senilai 28,62 % berasal dari Belanja Jasa Publikasi tidak maksimal karena keterbatasan waktu.
23	Monitoring Pelaksanaan Perda RTRW dan Pengendalian Teknis SPM Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat (77,33 %)	Sisa anggaran senilai 22,67 % merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran
24	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (80,86 %)	Untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh permintaan dari pihak ketiga, sehingga pencapaian relisasi sebesar 80,86 bukan mencerminkan rendahnya serapan anggaran.

KENDALA

	PROGRAM/KEGIATAN REALISASI FISIK < 100 % DAN KEUANGAN < 95%	BELANJA TIDAK LANGSUNG(RP)						BELANJA LANGSUNG(RP)						PENJELASAN OPD		
		PAGU DANA	REALISASI			SISA			PAGU DANA	REALISASI			SISA			
			KEUANGAN		FISIK	RP	%	KEUANGAN		FISIK	RP	%				
			RP	%				RP					%			
	JUMLAH PAGU DANA (BTL DAN BL)															
	BELANJA LANGSUNG															
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.540.000	6.051.910	92,54	100	488.090	7,46	Efisiensi Anggaran			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik						1.652.800.000	1.531.007.943	92,63	100	121.792.057	7,37	Sisa Anggaran			
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor						157.252.000	139.097.880	88,46	100	18.154.120	11,54	Efisiensi Anggaran			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						104.874.800	83.710.270	79,82	100	21.164.530	20,18	Efisiensi Anggaran			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						21.000.000	19.404.050	92,40	100	1.595.950	7,60	Efisiensi Anggaran			
6	Pengadaan Peralatan dan						7.000.000	6.640.000	94,86	100	360.000	5,14	Efisiensi Anggaran			

	Perlengkapan Kantor												
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						1.006.065.000	788.586.000	78,38	78,38	217.479.000	21,62	Rehab Kantor Kegiatan Rehab/Pemel Wilayah Sijunjung dana Rp. 200.000.000 realisasi Rp. 0 sisa Rp. 200.000.000 tidak terlaksana disebabkan adanya konflik dengan masyarakat setempat.
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor						81.150.000	54.552.460	67,22	100	26.597.540	32,78	Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional genset tidak terserap digunakan cadangan listrik mati.
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						313.729.000	297.440.000	94,81	100	16.289.000	5,19	Sisa Anggaran

10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						245.652.000	222.963.691	90,76	100	22.688.309	9,24	Sisa Anggaran
11	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						74.999.755	69.383.330	92,51	100	5.616.425	7,49	Sisa Anggaran
12	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD						220.000.000	195.995.993	89,09	100	24.004.007	10,91	Sisa Anggaran
13	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD						280.354.000	240.231.043	85,69	100	40.122.957	14,31	Efisiensi perjalanan dinas Sensus, dan pendataan asset
14	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan						2.016.237.600	1.774.664.200	88,02	100	241.573.400	11,98	1. Survey BMS anggaran Rp. 288.514.000 teralisasi Rp. 232.186.000 sisa Rp. 56.328.000 disebabkan karena tandatangan kontrak setelah DPA Perubahan T.A 2017 disetujui dan

15	Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah I						12.388.598.00 0	7.124.787.00 0	57,51	100	5.263.811.00 0	42,49	Paket Pembangunan Jembatan Lolong (P.100) anggaran Rp. 10.426.290.000 teralisasi Rp. 5.206.550.000 sisa Rp. 5.219.740.000 Penandatanganan Kontrak baru dapat dilaksanakan pada bulan sepetember karena paket diberi tanda bintang (*) menunggu APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan dokumen lingkungan sehingga waktu yang tersisa untuk pelaksanaan kontrak tidak memungkinkan untuk
----	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------	-------	-----	-------------------	-------	---

												menyerap seluruh dana yang tersedia di DPA.	
16	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi						1.450.000.000	219.530.665	15,14	15,14	1.230.469.335	84,86	Pengadaan Lahan dana Rp. 1.450.000.000 teralisasi Rp. 219.530.665 sisa Rp. 1.230.469.335 disebabkan Peta bidang terbit 21 Desember 2017 sehingga penilaian harga oleh Appraisal tidak dapat dilaksanakan pada tahun

													anggaran ini.
17	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis						3.998.238.271	51.931.396	1,30	1,30	3.946.306.875	98,70	Pengadaan Lahan dana Rp. 3.998.238.271 teralisasi Rp. 51.931.396 sisa Rp. 3.946.306.875 disebabkan untuk lokasi Convention Hall, kesesuaian Tata Ruang belum terbit sehingga proses pengadaan lahan tidak dapat dilaksanakan . Sedangkan untuk Jembatan Kuranji masih terdapat

													sengketa lahan dan putusan pengadilan baru terbit Oktober 2017 sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan.
18	Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah II						16.384.758.350	12.038.838.700	73,48	100	4.345.919.650	26,52	Paket Pembangunan Jembatan Barulak dan Pembangunan Jembatan Batang Ketek (P.079) dana Rp. 10.241.886.000 realisasi 5.908.690.200 sisa Rp. 4.333.195.800 disebabkan Kelalaian kontraktor dan

													2 bulan terakhir curah hujan tinggi sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta keterlambatan kedatangan komponen rangka jembatan. Pekerjaan saat ini di Lapangan dan direncanakan PHO pada tanggal 15 Februari 2018 (denda maksimal 50 hari kalender).
19	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Kab.Dharmasraya						2.700.000.000	2.499.863.397	92,59	92,59	200.136.603	7,41	Paket pembuatan beton drainase Pasar Koto Baru anggaran Rp. 200.000.000 teralisasi Rp. 0 sisa Rp. 200.000.000 ,

													disebabkan paket tersebut dibintang
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan						3.300.000.000	2.338.235.675	70,86	100	961.764.325	29,14	1. Paket Rehabilitasi Berat Jembatan Provinsi Rp. 1.828.329.000 teralisasi 955.074.000 sisa Rp. 873.255.000 disebabkan keterlambatan menghitung sisa dana setelah Adendum Kontrak sedangkan proses pengusulan DPA Perubahan telah berjalan 2. Paket Penggantian lantai jembatan Cibodak ruas jalan Singkarak - Aripan - Tj.

													Balit - Padang Ganting dana Rp. 495.700.000 realisasi Rp. 408.118.000 sisa Rp. 87.582.000 disebabkan muncul pada DPA Perubahan sisa dana merupakan sisa tender.
21	Penanganan Kondisi Kritis Jalan Jembatan Provinsi						2.700.000.000	2.529.772.335	93,70	100	170.227.665	6,30	Sisa Anggaran
22	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD						282.042.050	262.048.350	92,91	100	19.993.700	7,09	Efisiensi Anggaran
23	Penyusunan DED dan AMDAL SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat						98.530.000	91.984.450	93,36	100	6.545.550	6,64	Efisiensi Anggaran

24	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat Wilayah						4.268.598.000	3.706.382.643	86,83	98,58	562.215.357	13,17	1). Peningkatan SPAM kawasan Ujung Gading Kab. Pasaman Barat (lanjutan) dana Rp. 3.396.486.400 teralisasi Rp. 3.069.000.000 sisa Rp. 327.486.400 sisa tender. 2). Paket Pembayaran bobot sisa penyelesaian pekerjaan pengembangan SPAM Kws. Singgalang - Kota Padang Panjang Kab. Tanah Datar tahun 2016 dana Rp. 618.598.000 teralisasi Rp. 439.754.943 sisa Rp. 178.843.057 pelaksanaan pekerjaan tidak
----	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------	-------	-------------	-------	---

													selesai, didenda maksimal 50 hari tidak selesai kemudian putus kontrak fisik hanya teralisasi 62 %.
25	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat						400.000.000	293.586.477	73,40	100	106.413.523	26,60	Kegiatan yang ada sebagian besar berada di Ibukota dalam Provinsi, anggaran perjalanan dinas yang semula juga dianggarkan untuk monitoring dan evaluasi Kegiatan APBN tidak

													terlaksana dengan optimal karena keterbatasan waktu dan SDM.
26	Updating Database Bidang Keciptakarya-an Provinsi Sumatera Barat						150.000.000	137.999.880	92,00	100	12.000.120	8,00	Efisiensi Anggaran
28	Rekontruksi Bangunan Pasca Bencana III						13.188.252.200	11.652.724.533	88,36	100	1.535.527.667	11,64	Paket Pengadaan Interior dan Mebeulair Rumah Dinas Wakil Gubernur dana Rp. 3.950.000.000 teralisasi Rp. 2.446.619.000 sisa Rp. 1.503.381.000 disebabkan kondisi lapangan, sehingga dilakukan

													optimalisasi pengadaan Interior dan Meubeleur Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
29	Lanjutan Pembangunan Main Stadium Utama Sumatera Barat						15.000.000.000	11.104.134.650	74,03	100	3.895.865.350	25,97	Paket Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (lanjutan) dana Rp. 14.743.850.000 teralisasi Rp. 10.907.782.000 sisa Rp. 3.836.068.000 disebabkan kondisi lapangan, sehingga dilakukan optimalisasi.
30	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di						200.000.000	164.359.700	82,18	100	35.640.300	17,82	Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.

	Sumatera Barat												
31	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wilayah I						645.590.000	587.629.250	91,02	100	57.960.750	8,98	Paket Pembangunan Shelter di Mushalla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan) dana Rp. 100.000.000 teralisasi Rp. 87.459.000 sisa Rp. 12.541.000 disebabkan Harga Kontrak jauh dari HPS. Anggaran perjalanan dinas tidak terserap karena keterbatasan waktu.

32	Perencanaan Pembangunan Gedung						878.585.000	733.866.860	83,53	94	144.718.140	16,47	Paket DED Rehabilitasi Stadion GOR H. Agus Salim dana Rp. 50.000.000 realisasi Rp. 0 sisa Rp. 50.000.000 disebabkan pelaksanaan Kegiatan HPN tidak jadi dilaksanakan di Stadion GOR H. Agus Salim sehingga DED Rehabilitasi GOR H. Agus Salim tidak jadi dilaksanakan.
33	Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum						142.127.000	130.105.846	91,54	100	12.021.154	8,46	Efisiensi Anggaran
34	Kegiatan Profil Jasa Kontruksi						96.060.750	89.634.340	93,31	100	6.426.410	6,69	Efisiensi Anggaran
35	Kegiatan Lokakarya, Sosialisasi, dan Forum Komunikasi Jasa Kontruksi						184.199.700	163.085.600	88,54	100	21.114.100	11,46	Efisiensi Anggaran

36	Asesmen Bangunan dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan							94.490.500	88.841.525	94,02	100	5.648.975	5,98	Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak teralisasi dikarenakan SPPD disesuaikan dengan permintaan pihak yang membutuhkan.
37	Proses Legalisasi Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP)							463.771.300	395.337.259	85,24	100	68.434.041	14,76	Efisiensi Anggaran
38	Kampanye Publik Penataan Ruang							300.000.000	214.138.800	71,38	100	85.861.200	28,62	Belanja Jasa Publikasi tidak maksimal karena keterbatasan waktu.
39	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Perda RT RW dan Pengawasan Teknik SPM							145.746.900	112.709.383	77,33	100	33.037.517	22,67	Efisiensi Anggaran
40	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi							299.566.000	242.229.862	80,86	100	57.336.138	19,14	Faktor External untuk Belanja Sertifikasi / Kalibrasi/ Akreditasi) biaya

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran

Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas Meningkatkan keandalan system Jaringan jalan untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.

2. Pencapaian

Pencapaian kinerja Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 ini cukup baik dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini bisa dilihat pada capaian realisasi fisik pada tahun ini dengan rincian :

- Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan pada awal tahun 2017 ditargetkan 188,63 Km dan di Revisi Menjadi 187,63 KM terealisasi dibulan Desember tahun 2017 sebanyak 100 %.
- Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan pada awal tahun 2017 ditargetkan 9,00 Km dan di Revisi Menjadi 9,00 KM terealisasi dibulan Desember tahun 2017 sebanyak 100 %.
- Jumlah Rekonstruksi Jalan pada awal tahun 2017 ditargetkan 3,50 Km dan di Revisi Menjadi 4,11 KM terealisasi dibulan Desember tahun 2017 sebanyak 100 %.
- Jumlah Pemeliharaan RutinJembatan pada awal tahun 2017 ditargetkan 3.093,80M dan di Revisi Menjadi 3.028, 80 M terealisasi dibulan Desember tahun 2017 sebanyak 100 %.
- Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan pada awal tahun 2017 ditargetkan 278,30 M dan di Revisi Menjadi 415,80 M terealisasi dibulan Desember tahun 2017 sebanyak 100 %.
- Jumlah Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) pada awal tahun 2017 ditargetkan 28,00 dokumen dan terealisasi bulan Desember tahun 2016 sebanyak 95,00 %.
- Jumlah Layanan Perkantoran terealisasi sampai akhir tahun 2017 sebanyak 12,00 Bulan dan terealisasi bulan Desember tahun 2016 sebanyak 95,00%.

3. Kinerja Keuangan

Jumlah anggaran Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 ini adalah sebesar Rp 58.104.491.000,- kemudian dana di revisi menjadi Rp 54.546.088.000,-

4. Manajemen

Pemilihan SDM Satker dan PPK.

Kinerja satu unit organisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan tersedianya sumber daya manusia yang cukup, cakap dan handal, sampai dengan tahun 2017 masih terdapat kegiatan dari tugas pokok dan fungsi dari Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat yang belum berjalan dengan optimal. Upaya untuk meningkatkan agar pelaksanaan tugas dari organisasi dapat diselenggarakan lebih optimal telah dilaksanakan antara lain dengan menyamakan visi dan misi, meningkatkan rasa kebersamaan kepada seluruh pegawai, serta mengupayakan budaya kerja yang lebih berorientasi pada produk.

Bersamaan dengan adanya perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang diturunkan berdasarkan pendekatan kompetensi dan dilanjutkan dengan rotasi dan promosi pegawai ke pusat maupun antar provinsi maka terjadi rotasi pada eselon II, III, dan IV serta kepala Satker dan PPK di lingkungan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III, dan diharapkan rotasi dan promosi dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, menyelesaikan permasalahan yang ada, dan tantangan pekerjaan pada tahun-tahun mendatang.

5. Keterbatasan Pendanaan

Terbatasnya alokasi anggaran yang signifikan dibandingkan kebutuhan yang telah diusulkan sebelumnya tentunya akan mengakibatkan beberapa permasalahan yang harus dihadapi dan kendala pencapaian sasaran yang ditetapkan.

6. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

Kekurangan fasilitas kantor (jaringan internet, pc laptop, dan printer)

Mendapat penanganan ruas jalan yang belum bebas (Pelebaran Jalan)

Tidak tersedianya waktu yang cukup untuk masa transisi dan penguasaan tugas baru, sehingga mengakibatkan semua jajaran harus bekerja dengan kecepatan tinggi.

7. Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan agar kendala yang terjadi di tahun ini tidak terulang di tahun yang akan datang, sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal;

Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan terjaga akuntabilitasnya;

Meningkatkan kompetensi petugas pelaporan dengan memberikan alih pengetahuan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan/peraturan pemerintah yang baru secara bertahap dan tetap menjaga pencapaian target sesuai rencana dan kualitas.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri PU No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Pasal 84 menjelaskan bahwa Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbarmempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional.

Kegiatan, sebagaimana dicantumkan dalam Satker Dinas Prasarana Jalan Sumbar bahwa kegiatan merupakan basis satuan kinerja yang terkecil dari kegiatan pokok, sasaran maupun program dimana kinerja yang direncanakan harus disesuaikan dengan tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar TA. 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMBAR
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III SUMBAR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya	Indikator kinerja Output	
1	Pelayanan	Panjang jalan yang dapat pemeliharaan rutin	187,13 Km
2	Jalan Nasional	Panjang Jembatan yang dapat Pemeliharaan rutin	3.028,80 M
3		Panjang jalan yang dapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi	9 Km
4		Panjang jembatan yang dapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi	415,80 M
5		Panjang jalan yang mendapat rekontruksi/peningkatan struktur jalan	4,11 Km
6		Jumlah bahan jalan dan jembatan	Ton
7		Jumlah bahan dan peralatan jalan dan jembatan	Ton
8		Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan	Dokumen
9		Jumlah dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan	Dokumen
10		Jumlah dokumem monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan	Dokumen
11		Jumlah dokumen penyiapan dokumen lingkungan jalan dan jembatan	Dokumen
12		Jumlah dokumen pelaksanaan pengujian/manajemen mutu	Dokumen
13		Jumlah dokumen penyiapan bahan usulan program tahunan dan 5 tahunan	Dokumen
14		Jumlah laporan sistem pelaporan secara elektronik (E-monitoring)	28 Laporan
15		Jumlah bulan layanan Perkantoran	12 Bulan
16		Jumlah bulan layanan publik (PNBPN)	Bulan
17		Jumlah unit kendaraan bermotor	Unit
18		Jumlah unit perangkat pengelola data dan komunikasi	Unit
19		Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit

20		Jumlah luas gedung/bangunan	M2
	Menurunkan	Indikator Kinerja Output	
1	Waktu	Panjang jembatan yang mendapat penggantian	M
2	Tempuh Pada	Panjang jenbatan yang baru dibangun	M
3	Koridor Utama	Panjang jalan yang mendapat pelebaran	Km
4		Panjang pembangunan fly over/underpass/terowongan yang dibangun	M
5		Panjang jalan baru yang di bangun	Km
6		Panjang Jalan Bebas hambatan yang di bangun	Km
7		Panjang jalan yang di bangun/dilebarkan dikawasan strategis.perbatasan,wilayah terluar dan terdepan	Km
8		Panjang jembatan yang dibangun/diduplikasi di kawasanstran stegis,perbatasan,wilayah terluar dan terdepan	M

C. METODE PENGUKURAN

Pada Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat.Kasatker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar melakukan Penangan Ruas dengan cara long segment dan diberikan kepada pihak kedua (Penyedia Jasa) dengan Kontrak sesuai SBD 2016 pada TA.2017.Dimana setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kedua diawasi oleh personil lapangan (Pengawas) Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat.Dan Kasatker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar selalu memberi penjelasan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan mengutamakan mutu kerja dan melengkapai semua administrasi.

D. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Untuk TA.2017 Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar menangani ruas Padang – Pariaman – Painan sepanjang 116,47 Km dan Lubuk Selasih – Surian – Bts.Jambi Sepanjang 161,80 Km agar menjadi jalan nasional yang mantap. Dan ditangani dengan cara long Segment yaitu penanganan yang secara menerus pada ruas tersebut.Pada ruas tersebut ada yang ditangani dengan cara Rutin Prefentiv, Rekontruksi , dan Pelebaran

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Unit Kerja Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di lingkungan Satker

Penjelasan SDM berdasarkan :

✓ Pria dan Wanita

1. Pria : 24 Orang
2. Wanita : 10 Orang

✓ PNS dan Non-PNS

1. PNS : 21 Orang
2. Non PNS : 13 Orang

✓ Pendidikan terakhir

1. SD : 1 Orang
2. SLTP : -
3. SLTA : 12 Orang
4. DI,DII,DIII : -Orang
5. S1 : 17 Orang
6. S2 : 4 Orang

✓ Pangkat/ golongan

1. I/a,I/b,I/c,I/d : -
2. II/a,II/b,II/c,II/d : 21 Orang
3. III/a,III/b,III/c,III/d : 12 Orang
4. IV/a,IV/b,IV/c,IV/d,IV/e: 1 Orang

SARANA PRASARANA

Pada Satuan Kerja Dinas Prasana Jalan Propinsi Sumbar kekurangan SDM dan Kekurangan Perangkat pengolah data (komputer,laptop, Jaringan Internet,dan Lain-lain).

DIPA

Pada Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumbar mendapat pagu DIPA TA.2017 Rp.58.104.491.000 dan setelah pemotongan nilai kontrak dan revisi menjadi Rp.54.546.088.000. Terdapat 1 (Satu) sasaran dan 7 (Tujuh) output.

Terdiri dari :

1. Pemeliharaan Rutin Jalan
2. Rehabilitasi Jalan
3. Rekonstruksi Jalan
4. Pemeliharaan Rutin Jembatan
5. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan
6. Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring
7. Layanan Perkantoran

E. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja dapat dilihat dan diukur melalui indikator outcome yaitu capaian sasaran dan indikator output yaitu capaian kinerja kegiatan, serta merupakan dasar pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penelenggaraan Infrastruktur bidang jalan dan Jembatan.

Sasaran yang dicapai adalah **Mantapnya Jalan Nasional** dengan realisasi peroutput sebagai berikut:

Tabel Kriteria Penilaian

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80 – 90	Memuaskan	
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik	
4	B	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	
6	C	>30 – 50	Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang	

			mendasar	
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar	

1. Capaian Kinerja Fisik Satker Dinas Sumbar TA.2017

No	Program/Kegiatan	Vol/Sat	Dana (Rp)	Fisik		Kinerja
				Rencana	Realisasi	
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	187,13 Km	13.031.151	100%	100%	memuaskan
2	Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan	9,00 Km	15.058.647	100%	100%	memuaskan
3	Rekonstruksi Jalan	4,11 Km	19.134.476	100%	97,32%	memuaskan
4	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.028,80 M	1.664.751	100%	100%	memuaskan
5	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan	415,80 M	3.811.605	100%	100%	memuaskan
6	Sistem Pelaporan Elektronik (e-Monitoring)	28 Laporan	22.750	100%	95%	memuaskan
7	Layanan Perkantoran	12 Bulan	1.008.128	100%	100%	memuaskan

2. Capaian Kinerja Keuangan Satker Dinas Sumbar TA.2017

No	Program/Kegiatan	Vol/Sat	Dana (Rp)	Keuangan		Kinerja
				Rencana	Realisasi	
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	187,13 Km	13.031.151	100%	100%	memuaskan

2	Pemeliharaan Rehabilitas Jalan	9,00 Km	15.058.64 7	100%	100%	memuaskan
3	Rekontruksi Jalan	4,11 Km	19.134.47 6	100%	99,74%	memuaskan
4	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.028,80 M	1.664.751	100%	100%	memuaskan
5	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan	415,80 M	3.811.605	100%	97,37%	memuaskan
6	Sistem Pelaporan Elektronik (e-Monitoring)	28 Laporan	22.750	100%	89,77%	Baik
7	Layanan Perkantoran	12 Bulan	1.823.708	100%	97,91%	memuaskan

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Untuk tercapai efektifitas dan efesiensi seluruh kegiatan pada Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan Satker antara lain:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisai sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendegalisasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait

BAB VI

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LPPD disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LPPD ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 17 (tujuh belas) program, meliputi: 12 (dua belas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Pada tahun anggaran 2017 terdapat (dua) sasaran strategis Dinas yang seluruhnya dapat diukur berdasarkan target indikator kinerjanya masing-masing. Pada umumnya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja sebelumnya dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing program.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LPPD ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 ini adalah sebesar **92.64%** (Rp. 335.323.949.259,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 361.958.573.304,-.
2. Dari 17 (tujuh belas) program yang ada pada tahun 2017, pencapaian fisik pekerjaan terlaksana dengan kinerja Sangat baik sebanyak 17 (tujuh belas) program.

3. Kualitas pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program tahun 2017 yaitu: 13 (tiga belas) program berkinerja Sangat baik, dan 4 (empat) program berkinerja *baik*.
4. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada.
5. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2017 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2018
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010